

AMBIVALENSI BIROKRAT HINDIA BELANDA: STUDI KASUS VISI HASAN MUSTAPA AKHIR ABAD XIX

Mohammad Refi Omar Ar Razy¹, Muhammad Miqdad Rojab Munigar²
dan Tarunasena Ma'mur³

¹Universitas Negeri Surabaya, Jl. Lidah Wetan, Lidah Wetan, Kec. Lakarsantri, kota Surabaya, Jawa Timur 60213

²Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor,
Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363

³Universitas Pendidikan Indonesia, Jl. Dr. Setiabudi No.229, Isola, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40154
E-mail: refirazy19@gmail.com; miqdadrojab@gmail.com; tarunasena@upi.edu)

ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan transisi politik di Kesultanan Aceh pada akhir abad XIX melalui sudut pandang Hasan Mustapa. Meskipun banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai kesulitan-kesulitan yang dihadapi Hindia Belanda dalam menaklukkan Aceh, namun masih sedikit penelitian yang mengkaji kondisi-kondisi tersebut dari sudut pandang pegawai negeri setempat. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Melalui pembacaan catatan harian Hasan Mustapa, kami mencoba mengelaborasi visi Hasan dalam fase masa transisi dan pengintegrasian Aceh ke dalam wilayah Hindia Belanda. Hasan Mustapa, seorang pemuka agama dari Garut yang terkenal di Makkah karena murid-muridnya yang cendekia, diangkat sebagai Penghulu (1893–1895) di Kutaraja, Aceh, atas rekomendasi Snouck Hurgronje kepada Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda. Ambivalensi Hasan dalam memaknai masa transisi dan integrasi Aceh yang kompleks mencerminkan kewajiban ganda untuk memenuhi tugas birokrasi kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda sekaligus bersimpati pada perjuangan rakyat Aceh sebagai sesama Muslim. Selain itu, Sultan Muhammad Daud Syah muncul sebagai tokoh penting dalam perjuangan rakyat Aceh, yang melanjutkan perlawanan mereka dalam masa transisi dan integrasi Aceh. Meskipun banyak pemimpin dan pejabat tinggi ditinggalkan selama perang, perlawanan rakyat Aceh yang terus berlanjut menjadi tantangan yang signifikan bagi pemerintah kolonial.

Kata kunci: Hasan Mustapa; Ambivalensi; Birokrasi

AMBIVALENCE OF DUTCH-INDIAN BUREAUCRATS: A CASE STUDY OF HASAN MUSTAPA'S VISION OF THE LATE NINETEENTH CENTURY

ABSTRACT. This study aims to explain the political transition in the Sultanate of Aceh at the end of the 19th century through the perspective of Hasan Mustapa. Although much research has been done on the difficulties the Dutch East Indies faced in conquering Aceh, little research examines these conditions from the perspective of local civil servants. This research uses the historical method of heuristics, criticism, interpretation, and historiography. Through reading Hasan Mustapa's diary, we try to elaborate on Hasan's vision during the transition and integration of Aceh into the Dutch East Indies. Hasan Mustapa, a religious leader from Garut who was famous in Mecca for his scholarly students, was appointed as Penghulu (1893-1895) in Kutaraja, Aceh, on Snouck Hurgronje's recommendation to the Dutch East Indies Colonial Government. Mustapa's ambivalence in interpreting Aceh's complex transition and integration reflected his dual obligation to fulfill his bureaucratic duties to the Dutch East Indies colonial government while sympathizing with the Acehnese people's struggle as fellow Muslims. In addition, Sultan Muhammad Daud Syah emerged as an important figure in the battle of the Acehnese people, who continued their resistance in Aceh's transition and integration. Although many leaders and high-ranking officials left during the war, the continued resistance of the Acehnese people posed a significant challenge to the Colonial government.

Keywords: Hasan Mustapa; Ambivalence; Bureaucrats

PENDAHULUAN

Tulisan ini akan menggambarkan masa transisi di Aceh pada periode akhir abad XIX dilihat dari sudut pandang seorang Hasan Mustapa. Kaitannya dalam hal ini kami berargumen bahwa Hasan adalah seorang yang ambivalen. Adapun menurut Homi K. Bhabha bahwa ambivalensi dalam kerangka kolonial adalah pengimplementasian antara visi kolonial dan lokal dalam waktu yang bersamaan. Seorang bumiputra yang mengalami sikap ambivalensi cenderung akan berpihak pada apa yang disebut

sebagai wacana pembaratan serta menguntungkan pihak kolonial (Bhabha, 1994). Masa transisi yang dimaksud mengacu kepada peralihan pemerintahan di Aceh dari Kesultanan Aceh hingga menjadi Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Peralihan kekuasaan akan berdampak kepada para elite serta seluruh masyarakatnya. Beberapa dari elite dan masyarakat lainnya berada dalam pilihan yang sulit. Hal ini secara umum membuat masyarakat Aceh terbagi dua, yaitu mendukung Sultan Aceh atau Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda. Situasi runyam dari adanya konflik yang terjadi di

Aceh menyebabkan masyarakatnya mengalami transformasi akibat depresi (Kloos, 2014). Hasan yang saat itu menjabat sebagai *Hoofdpanghoeloe* di Kutaraja merekam peristiwa tersebut dengan baik.

Hasan Mustapa [Gambar 1] lahir di Limbangan, Garut pada 1852. Pertemanannya dengan Snouck Hurgronje membawa Hasan ke Kutaraja. Kedekatan antar keduanya sudah terjadi sejak Snouck berada di Makkah. Ia banyak berinteraksi dengan orang Nusantara yang sedang melakukan ritual haji, salah satunya adalah Hasan Mustopa. Dari perkenalan itu di Makkah membawanya akrab ketika Snouck ditugaskan di Jawa (Laffan, 2003, 2015, 2022; Witkam, 2022). Hasan diberikan mandat sebagai *Hoofdpanghoeloe* (Kepala Penghulu) di Kutaraja, Aceh (van Koningsveld, 1989). Snouck memilih Hasan Mustapa untuk menempati posisi Kepala Penghulu bukan tanpa alasan. Namanya cukup terkenal sebagai Ulama Tasawuf di Makkah. Popularitasnya membawa Hasan memiliki berbagai akses terhadap para ulama Hindia Belanda di Makkah (Azra, 2010). Oleh karena itu, ketika Hasan ditugaskan di Kutaraja ia tidak terlalu kesulitan dalam berinteraksi dengan para ulama di Aceh. Beberapa Ulama Aceh sempat Hasan temui di Makkah sehingga interaksi tidak menjadi penghalang baginya (Laffan, 2002). Laporannya di Aceh sebagai Kepala Penghulu disampaikan kepada Pemerintah Kolonial Hindia Belanda (serta Snouck) sebagai data yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah kolonial. Oleh karena itu, Hasan juga identik disebut sebagai seorang informan (Rohmana, 2018b). Pola kerja yang serupa dapat dilihat dari informan Snouck lainnya seperti Aboe Bakar Djajadiningrat dan Sayyid Uthman (Kaptein, 2014; Laffan, 1999, 2003). Kedekatannya dengan Snouck dan tugasnya di Aceh, Hasan Mustapa terkenal sebagai seseorang yang mendukung Pemerintah Kolonial Hindia Belanda.



Gambar 1. Hasan Mustapa dalam Edisi Majalah Djawa ke 11 tahun 1931

Walaupun demikian, mengenai pemikiran, pandangan, dan visi Hasan bukan berarti belum pernah ditulis sama sekali. Pertama-tama tulisan mengenai pemikiran Hasan pernah ditulis oleh R. Memed Sastrahadiprawira dengan judul *Hadji Hasan Moestopa's Adatgebruiken Der Soendaneezen* (1931). Sastrahadiprawira mencoba menerjemahkan teks dari karya Hasan yang berjudul *Bab Adat-Adat Urang Priangan jeung Urang Sunda Lian ti Eta*. Secara internal, isi dari buku tersebut kurang jelas dan kualitas sastranya mengecewakan. Namun, tulisan ini menjadi sebuah tugas untuk mencegah agar buku tersebut tidak dilupakan sehingga budaya Sunda lebih mudah diakses oleh khalayak. Isinya berfokus pada adat istiadat dan tradisi masyarakat Priangan dan Sunda, seperti larangan “pamali” dan “kiparat” serta konsekuensi yang akan dihadapi ketika melawan larangannya tersebut seperti “*Tjadoe*” atau “*Bujut*” (Sastrahadiprawira, 1931).

Sebagian besar tulisan mengenai Hasan pernah ditulis oleh Jajang A. Rohmana. Misalnya mengenai pemikiran sufisme yang dapat dilihat dari beragam dangding karya Hasan. Bait dangding tersebut mencerminkan pencarian batinnya dalam tradisi sufi (Rosidi, 1989). Struktur dangding Mustapa memiliki corak yang khas. Hal ini terefleksikan dari diksi dalam dangding yang disusun dengan pemilihan kata yang cukup kreatif. Selain itu, imbuhan-um disandingkan dengan kata yang tidak biasa misalnya imbuhan tersebut sebagai pengaruh orang Jawa yang dikelola secara kreatif dan pengaruh sufi Arab yang dikutip dari ayat-ayat Al-Qur'an atau hadist (Rohmana, 2012). Tidak hanya itu, keakrabannya dengan Snouck dapat dielaborasi dalam karya Rohmana yang lain. Melalui pembacaan korespondensi, keakraban keduanya dapat diulas lebih jauh tidak hanya dilihat dari satu perspektif saja, variabel dan unsur kekerabatan mereka juga cukup kuat (Asura, 2020; Kartini et al., 1985). Kedekatan mereka semakin kuat terlebih ketika Snouck mengunjungi pesantren di seluruh Jawa yang didampingi oleh Hasan. Selain itu, ketika Snouck mempersunting seorang perempuan berasal dari Ciamis juga merupakan anjuran dari Hasan. Oleh karena itu, beberapa momen antar keduanya lebih dari hanya sekedar urusan politik (Rohmana, 2016, 2018b, 2018a).

Belum ada yang secara spesifik menjelaskan visi Hasan dalam melihat masyarakat Aceh kala itu pada masa transisi dan integrasi Aceh ke dalam wilayah Hindia Belanda. Dengan demikian, penulisan ini mencoba mengelaborasi bagaimana perspektif Hasan dalam melihat situasi politik pada masa transisi dan perubahan pola perilaku masyarakat kala itu. Tulisan ini mencoba menemukan perspektif Hasan mengenai pandangan pemerintah kolonial dan masyarakat Aceh. Secara umum Pemerintah Kolonial

Hindia Belanda berhasil membelah masyarakat Aceh khususnya Uleebalang dan Ulama. Namun, dalam kubu Uleebalang yang dianggap memihak Pemerintah Kolonial terdapat golongan yang berpihak pada Sultan Aceh. Dalam kasus Teuku Umar yang awalnya memihak pemerintah kolonial lalu melakukan perlawanan adalah salah satu yang paling menarik untuk dibahas karena telah diprediksikan oleh Hasan beberapa tahun sebelumnya (Damhoeri, 1939). Hal tersebut juga terjadi dikalangan para Ulama karena tidak semua Ulama Aceh memihak terhadap Kesultanan (Alfian, 1987). Akibatnya, masyarakat menjadi dilema dengan diiringi rasa cemas dan takut yang berujung menjadi sebuah gerakan sosial.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri dari empat tahap, yaitu: Heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Lihat (Kuntowijoyo, 1994; Lubis, 2020; Sjamsuddin, 2012)). Oleh karena berkaitan dengan masa lalu, sejarah erat kaitannya dengan jejak-jejak yang sudah ditinggalkan. Jejak yang sudah ditinggalkan dapat berupa dokumen (pribadi dan resmi), objek material lain, dan objek formal (Ankersmit, 1987).

Dalam penelitian ini kami memfokuskan pada pembacaan catatan harian Hasan yang ditulis pada 1893 serta rampung pada 25 Juli 1894. Catatan tersebut ditemukan di perpustakaan Universitas Leiden (Katalog No. Or. 7636). Menurut penuturan Hasan, catatan hariannya ditulis pukul tujuh pagi hingga dua malam (Mustapa, 1894). Catatan tersebut ditulis menggunakan aksara Latin dengan bahasa Melayu. Adapun beberapa data lainnya mengenai Aceh dapat dilihat dalam korespondensi Hasan dengan Snouck. Namun, kali ini kami akan menggunakan transkripsi dan transliterasi korespondensi antara Snouck dan Hasan yang telah dilakukan oleh Jajang A. Rohmana (Rohmana, 2018a). Selain itu, kami juga menggunakan beberapa arsip serta surat kabar mengenai pengambilalihan kekuasaan Aceh oleh pemerintah kolonial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Intermeso Hasan Mustapa di Makkah dan Kontak Awal dengan Snouck Hurgronje

Makkah telah lama menjadi tujuan bagi umat Islam dari seluruh dunia, termasuk umat Islam dari Hindia Belanda. Antara abad ke-XVII hingga ke-XIX, lebih banyak Muslim dari Hindia Belanda yang pergi ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji dibandingkan dari wilayah lainnya. Tokoh-tokoh terkenal seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, Aboe

Bakar Djajadiningrat, dan Hasan Mustapa memiliki cerita tentang perjalanan mereka ke Makkah. Kebanyakan dari mereka belajar dan menetap di Makkah untuk memantapkan pengetahuan agama mereka yang sebelumnya telah dipelajari di Hindia Belanda. Namun, dalam kasus Hasan, perjalanannya ke Makkah masih belum tergambarkan karena sedikit catatan yang membahas soal apa yang ia lakukan selain dengan menunaikan ritual haji.

Fenomena haji menjadi perhatian Pemerintah Kolonial Hindia Belanda sehingga menarik perhatian para intelektual Belanda untuk mempelajarinya secara komprehensif. Snouck Hurgronje misalnya, menulis disertasi tentang ritual haji dan kemudian melakukan perjalanan ke Makkah pada tahun 1884 untuk menyelidiki desas-desus tentang pembantaian yang dilakukan oleh pemerintah kolonial, dengan dukungan Pemerintah Belanda. Penyebaran rumor ini menimbulkan kekhawatiran bagi Pemerintah Kolonial.

Pada 1888, Christiaan Snouck Hurgronje menerbitkan sebuah artikel tentang sebuah pengakuan ulama di Makkah setelah ulama tersebut bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad (Drewes, 2008; Kuitenbrouwer, 2013). Artikel ini memainkan peran penting dalam meyakinkan pemerintah Belanda bahwa Snouck adalah orang yang tepat untuk ditugaskan oleh Konsul Jeddah. Snouck sangat ingin mempelajari Islam sebagai sebuah agama yang dipraktikkan dan berharap dapat mengikuti jejak studi George Lane di Mesir. George telah berhasil menginspirasi Snouck melalui berbagai karyanya soal Timur Tengah dan Islam. Bersama dengan kenalannya di Jeddah, Snouck berhasil memasuki Makkah setelah menghabiskan beberapa minggu untuk mempelajari masyarakat di sana. Bantuan tersebut datang dari seorang yang berasal dari Banten, bernama Abu Bakar Djajadiningrat (Laffan, 1999; Witkam, 2022). Snouck memperoleh banyak data untuk menyusun laporan selama ia berada di Makkah. Setelah beberapa tahun di Makkah, ia kembali ke Belanda untuk mengajar di Universitas Leiden.

Situasi di Hindia Belanda cukup membuat pemerintah kolonial kewalahan apalagi dengan peristiwa yang terjadi di Cilegon pada 1888. Belanda berasumsi bahwa apa yang terjadi di Cilegon berkaitan erat dengan fenomena politik Islam. Oleh karena itu, untuk mempelajari berbagai gejala yang terjadi di Cilegon, Snouck ditunjuk sebagai "Penasihat" dan ditugaskan untuk memberikan nasihat tentang pelatihan dan pengiriman pejabat Hindia Belanda ke Jeddah juga mempelajari praktik Islam. Terlebih lagi Snouck ditugaskan untuk meneliti corak perkembangan Islam (Buskens et al., 2022; Doel, 2023). Penunjukan ini menandai awal pekerjaan Snouck sebagai birokrat di Hindia Belanda

Pada Mei 1889, Snouck tiba di Batavia. Di Batavia ia cukup disegani oleh berbagai kalangan dengan dua alasan. Pertama, sebagai seorang orientalis yang disegani karena perjalanannya ke Makkah membuka pengetahuan tentang Islam bagi para sarjana di barat. Kedua, di kalangan masyarakat setempat ia dipandang sebagai seorang Muslim yang cakap meskipun tanpa gelar haji atau mufti. Selain itu, ia juga memiliki nama Islam, Abdul Ghaffar. Di Hindia Belanda ia disibukkan dengan perjalanannya ke berbagai wilayah di pulau Jawa (Drewes, 1968; Suminto, 1985).

Dari perjalanan inilah ia mulai berinteraksi dengan para Ulama lokal terutama Hasan yang ketika itu berada di Limbangan, Garut. Snouck mengaku pernah bertemu dengan Hasan di Kota Makkah dan menganggapnya sebagai cendekiawan penting karena ilmu tasawufnya yang Snouck anggap cukup mumpuni (Rohmana, 2016; Witkam, 2022). Dalam catatan Snouck, Hasan adalah murid Muhammad Garut di Makkah, bersama dengan ulama-ulama lain seperti Syekh Nawawi, Muhammad Hasan, Mustafa 'Afifi, dan 'Abdallah Al-Zawawi (Djajadiningrat, 1927). Pasca kembali dari Makkah, Hasan Mustapa kembali ke kampung halamannya. Hasan menjadi figur di Limbangan karena keilmuannya. Oleh sebab itu, Hasan dekat dengan para pejabat pemerintahan lokal dan kolonial. Namun, saat itu Hasan tidak bekerja dan ayahnya tidak mampu membiayai kehidupan Hasan lebih lanjut. Ayah Hasan tidak dapat lagi mendukung dalam memenuhi kebutuhan hidup Hasan. Dengan demikian, Hasan diberi sekolah dan tempat tinggal di dekat masjid kota oleh kolega kolonialnya. Masjid kota menjadi tempat Hasan untuk mengajarkan ilmu pengetahuannya bagi masyarakat sekitar. Terlebih ia juga rajin menulis catatan mengenai tasawuf (Burhanudin, 2017). Catatan dan konektivitas Hasan tersebut memberikan wawasan berharga bagi Snouck yang kala itu sedang memahami praktik Keislaman di Hindia Belanda (Chambert-Loir, 2013)

Pada awalnya Hasan banyak memberikan informasi mengenai pengetahuan Islam. Lambat laun Snouck menggiringnya dengan berbagai pertanyaan mengenai kultur penduduk lokal. Hasan yang saat itu belum memiliki pekerjaan yang layak, menginginkan pekerjaan yang profesional sebagai informan dengan meminta bayaran 50 gulden per bulan (Rohmana, 2016). Melalui kerja samanya dengan Hasan metode penelitian Snouck mulai terlihat jelas karena catatan-catatan yang Hasan buat. Snouck mencatat kunjungan ke berbagai pesantren, serta mendokumentasikan materi yang diajarkan, nama-nama guru, dan tarekat yang mereka wakili. Dalam beberapa kasus, Snouck bahkan tidak perlu bertanya karena Hasan karena telah menyusun daftar karya-

karya berbahasa Arab yang digunakan di Priangan untuk pemerintah yang bisa Snouck pelajari (Benda, 1958). Informasi ini menjelaskan metode penelitian Snouck dan memberikan wawasan tentang materi serta ajaran yang ada di Priangan pada saat itu.

Di saat yang bersamaan kepentingan kolonial di Aceh semakin mendesak saat memasuki dekade 1890-an. Upaya penaklukan Aceh selalu gagal dilakukan sejak kedatangan Belanda di Aceh delapan belas tahun sebelumnya (Veer, 1985). Snouck mulai tertarik dengan apa yang terjadi di Aceh. Upayanya untuk pergi ke Aceh diusahakan oleh koleganya yaitu Habib Abd. al-Zahir yang Snouck kenal semasa di Makkah juga (Ozay, 2020). Saat itu, Snouck tertarik untuk menjadi mediator antara Sultan dan perwakilan pemerintah kolonial. Penawaran Snouck untuk sebagai mediator ditolak oleh pemerintah kolonial dengan dalih karena jasanya dianggap lebih berguna di Jawa. Setelah menyelesaikan penelitian terkait ulama dan pesantren di Jawa, Snouck tetap bersedia mengalihkan fokus ke Aceh dan memberanikan diri untuk melapor ke Kutaraja (Ibu kota pemerintahan kolonial di Aceh) pada Juli 1891 (McFate, 2019).

Meskipun kemudian, Snouck menunjukkan ironi dalam menggambarkan beberapa koleganya di Aceh. Berbagai cerita tersebut Snouck sampaikan kepada gurunya, Theodor Nöldeke. Apa yang disampaikan pada Nöldeke berkisar mengenai cerita bahwa Snouck menikmati bekerja dengan para kolega Belandanya, terutama karena persahabatannya dengan J.B. Van Heutsz, seorang perwira militer Belanda yang bertanggung jawab atas wilayah Aceh. Namun, apa yang terjadi di Aceh tidak mereda. Konflik dan pertempuran masih terjadi di mana-mana.

Atas dasar tersebut Snouck memberikan saran kepada pemerintah kolonial untuk mengangkat seorang penghulu dari seorang kepercayaan. Hasan dianggap yang paling layak untuk menempati posisi tersebut. Kontribusinya di Garut tidak dapat diabaikan, Hasan adalah sosok yang berharga bagi Snouck. Penelitian Snouck di Aceh dan Dataran Tinggi Gayo difasilitasi oleh para informan kunci, terutama Hasan, yang memberikan laporan-laporan dari Kutaraja (Laffan, 2022). Laporan-laporan ini mencakup informasi tentang pergerakan Teuku Umar, ancaman terhadap Van Langen, dan urusan internal Belanda. Laporan-laporan tersebut juga berisi rincian tentang budaya keagamaan seperti deskripsi tentang ratib oleh seorang perwakilan tarekat Aceh (Razy et al., 2023). Snouck menggunakan informasi ini untuk laporannya sendiri, sementara Hasan bertindak sebagai mediator antara Belanda dan Aceh. Hasilnya adalah laporan empat jilid yang membahas mengenai bahasa, politik lokal, adat istiadat, agama, adat, hubungan keluarga, pertanian, dan geografi. Singkatnya hasil dari penelitian dan pengamatan

Snouck tersebut memberikan saran untuk Van Heutsz agar mendukung Uleebalang (pemimpin sipil dalam struktur pemerintahan Kesultanan Aceh) dan represi secara kooperatif terhadap Ulama (pemimpin agama) (Gobee & Adriaanse, 1990).

Hasan di Antara Dua Kekuatan

Hasan resmi diangkat menjadi Kepala Penghulu Kutaraja pada 1893. Pengangkatan Hasan Mustapa sebagai Kepala Penghulu sempat menjadi berita di berbagai surat kabar yang terbit di Belanda maupun Hindia Belanda. Misalnya dalam surat kabar yang menuliskan artikel dalam kolom kecil, sebagai berikut. *Onstlagen: op verzoek eervol uit 's Lands dienst, de hoofdpanghoeloe te Kota-Radja (Atjeh en Onderhoorigheden) Hadji Abdullah. Benoemd: tot hoofdpanghoeloe te Kota-Radja, Hadji Hasan Moestapa, godsdienstleeraar te Garoet (Preanger Regentschappen).* ("Laatste Berichten," 1893). Dari kutipan tersebut dapat diketahui bahwa Hasan Mustapa bukanlah Kepala Penghulu Kutaraja yang pertama, tetapi jabatan tersebut sudah eksis sebelumnya.

Bahkan hal menarik lainnya adalah bahwa Haji Abdullah pun bukanlah orang pertama yang dipercaya untuk menjabat sebagai Kepala Penghulu Kutaraja. Dalam surat kabar *De Locomotief* pada Mei 1882 memuat pemberitaan mengenai pengangkatan Kepala Penghulu Kutaraja. *Onstlagen: Eervol uit zijn betrekking, wegens ziekte, de hoofdpanghoeloe te Katta-Radja (Atjeh) Tongkoe Mohamad ... Benoemd: Tot hoofdpanghoeloe te Kotta-Radja, Hadji Abdullah, thans met de waarneming der betrekking belast ...* ("Inlandsch Bestuur," 1882). Menurut penelusuran dari sumber surat kabar lainnya dapat diidentifikasi bahwa Kepala Penghulu pertama Kutaraja Aceh adalah Habib Achmad bin Mohamad Sagaf. Setelah Habib Achmad habis masa jabatannya, Kepala Penghulu di Kutaraja diisi oleh Teungku Mohamad. *Onstlagen: Eervol, uit 's lands dienst, de hoofdpanghoeloe te Kota-Radja, Habib Achmad bin Mohamad Sagaf ... Benoemd: Tot hoofdpanghoeloe te Kota-Radja (Atjeh) Tongkoe Mohamad; imam der mesdjid in kampong Djawa ...* ("Inlandsch Bestuur," 1880). Dengan demikian, dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa jabatan Kepala Penghulu Kutaraja Aceh secara berurutan hingga Hasan Mustapa, yaitu Habib Achmad bin Mohamad Sagaf (1877–1880), Teungku Mohamad (1880–1882), Haji Abdullah (1882–1893), dan Hasan Mustapa (1893–1895).

Munculnya jabatan *Hoofdpanghulu* yang didesain oleh pemerintah kolonial merupakan hal yang mendesak di Aceh. ketegangan dan persaingan di antara Uleebalang dan Ulama. Ulama sangat populer ketika Perang Aceh berlangsung karena

banyak dari kalangan mereka menjadi pemimpin perjuangan melawan Belanda. Mereka tidak akan pernah menerima pemerintahan kolonial yang dipimpin oleh sosok yang dianggap kafir. Sebaliknya para Uleebalang merasa kewenangannya ditantang oleh para Ulama (Reid, 2005; Steenbrink, 1995). Oleh karena itu, jika menindas Ulama besar kemungkinan Uleebalang akan bersedia bekerja sama, tetapi untuk melakukan misi ini Kolonial Belanda memerlukan informasi dari Ulama-Ulama Aceh sehingga muncul gagasan pembentukan Penghulu. Lembaga *Hoofdpanghulu* yang dibentuk oleh pemerintah kolonial dapat menjadi mata-mata dan penghubung antara para ulama dengan pemerintah (Suminto, 1985; Veer, 1985).

Posisi Hasan sebagai *Hoofdpanghulu* dapat dijelaskan dalam sifat ambivalensi. Sikapnya yang mendua justru menandakan Hasan sebagai pegawai birokrat yang piawai dalam bersikap kepada atasannya di Batavia maupun kepada masyarakat Aceh (Laffan, 2002). Hasan dapat mengakses berbagai informasi dari kedua belah pihak karena dekat dengan petinggi Hindia Belanda dan juga pemuka maupun masyarakat di Kesultanan Aceh. Hasilnya adalah catatan harian yang mengungkapkan kondisi masyarakat Aceh dari kalangan bawah hingga elite.

Hasan menggambarkan apa yang terjadi di Aceh sebagai ulah dari Belanda itu sendiri. *Adapoen compeni itoe mahoe ambil negeri Atjeh tiada pake dami sama Soeltan atawa sama Toewankoe Hasim Banta Moeda Mangkoeradja ...* (Mustapa, 1894). Dari kutipan tersebut dapat diketahui bahwa niatan Belanda ialah ingin mengintegrasikan Kesultanan Aceh secara keseluruhan dengan menghilangkan kedaulatan Sultan sepenuhnya sehingga menyebabkan penolakan dan konflik yang berkepanjangan. Apa yang dilakukan oleh Belanda juga tidak hanya terjadi di Aceh, di saat yang bersamaan, pengintegrasian wilayah Bali juga sedang gencar dilakukan. Oleh karena itu, perang menjadi pilihan para petinggi pemerintahan kolonial Hindia Belanda dalam penaklukan Aceh. Namun, hal ini justru membuat Kesultanan Aceh semakin sulit ditaklukan oleh Hindia Belanda. Kesulitan ini karena adanya kekuatan Sultan Muhammad Daud Syah yang kuat beserta para Teuku serta anjuran mengadakan Perang Sabil membuat para Teungku ikut turun tangan.

Dalam kerangka realisasi Perang Aceh kekuatan analisis Snouck yang sebagian besar informasinya didapatkan dari Hasan mengenai penaklukan Aceh akhirnya diabaikan juga oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda (McFate, 2019). Hal ini terbukti dari dua kutipan sebelumnya yang menjelaskan *compeni* (Hindia Belanda) tidak ingin berdamai dengan

Sultan, sedangkan Snouck sendiri menyarankan agar tidak ada pertempuran secara konfrontatif. Dalam catatan hariannya ia menolak ide pemerintah kolonial yang ingin melakukannya pertempuran secara membabitnya dengan menuliskan “*potong saja poenja leher djikalau tida datang Soeltan di sini lekas negeri aman dan orang2 djahat tidak berani pasang dan Hoeloe2 Balang tentoe toendoek sama compeni dengan setia sebetoelnja ... Maka dari itoe soedah djadi basah dari T. Nek compeni Atjeh itoe boeta mata dan jang di Betawi Boeta toeli tidak ingat saja poenja kebaikan sama compeni*” (Mustapa, 1894).

Kutipan tersebut memberikan kesan bahwa Hasan justru mendukung pemerintah kolonial dengan meniadakan Sultan Aceh pun tidak menjadi masalah namun harus dengan cara yang baik. Menurut Hasan, hal ini justru akan membawa perdamaian di Aceh. Namun, jika melihat redaksi maupun wacana yang dibangun oleh Hasan menyiratkan adanya perdamaian jika Sultan tidak untuk diganggu. Hal ini karena Hindia Belanda tidak ingin mengikuti saran dari dua teman dekat Hasan, yaitu Snouck dan Teuku Nek yang memberikan nasihat untuk tidak mengganggu Sultan Aceh. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Perang Aceh yang berdarah terjadi terus-menerus karena pemerintah kolonial tidak memiliki opsi untuk berdamai secara baik-baik dengan Sultan, tetapi memilih untuk menyerang Sultan Aceh secara konfrontatif (Abdullah, 2000).

Kerunyaman di Aceh salah satunya disebabkan akibat perbedaan pandangan serta manifes yang dijalankan oleh Uleebalang dan Ulama di sana. Perbedaan ini merupakan bagian dari arah politik yang dilancarkan oleh masing-masing kubu sebagai pemuka dan petinggi di Kesultanan Aceh. Fenomena ini sempat disinggung oleh Hasan Mustapa dalam suratnya yang ditujukan kepada Snouck Hurgronje. Masyarakat Aceh mengeluhkan beberapa hal mengenai Teuku Umar, khususnya adalah ketakutan akan penyerangan Teuku Umar. Dalam surat yang dialamatkan kepada Snouck tertanggal 13 Juni 1894, Hasan mendalami hal tersebut dari informannya bernama Chik Bintang yang juga anak buah Teuku Umar. Chik Bintang mengatakan bahwa rakyat Aceh takut diserang selama Teuku Umar memegang posisi ini, mungkin sebagai kolaborator Belanda (Rohmana, 2021a). Tentunya hal ini sangatlah masuk akal karena adanya peperangan dan pembelotan membuat kekhawatiran bagi masyarakat. Hal ini dapat menjadi generalisasi dari ketidakpastian dan ketidakstabilan politik Kesultanan Aceh.

Namun, di sisi lain Hasan Mustapa sempat menuliskan hal yang berbeda dalam catatan hariannya mengenai keberpihakan Teuku Umar kepada pemerintah kolonial. *Apa orang Atjeh takoet sama*

bangsanja jang soedah diangkat sama compeni seperti sekarang T. Oemar lebih perkasa dengan berani Djawab: Orang Atjeh soeka hati liat bangsanja atawa pemilinja dapat nama dan harta dari compeni sebab tentoe dia bisah tolong sama kita poenja kesoesian (Mustapa, 1894). Hal ini menjadi menarik karena dua sumber tersebut hanya berselang satu bulan saja dari penulisannya. Dari catatan tersebut dapat diketahui bahwa pembelotan atau pengkhianatan tersebut ternyata tidak selalu berdampak buruk bagi masyarakat Aceh.

Lambat laun karena ketidaksesuaian apa yang Hasan dan Snouck harapkan bagi pemerintah kolonial tidak digubris akhirnya Hasan memilih untuk mengikuti jalan Snouck yang berbeda dengan pemerintah kolonial (Steenbrink, 1995). Hasan tidak lagi berfungsi jika hanya ditempatkan di Aceh ketika pemerintah kolonial melakukan konfrontasi. Oleh karena itu, Snouck menginisiasi agar Hasan dapat dipindahkan ke wilayah Priangan. Terkait hal tersebut memang ketika itu posisi yang diinginkan oleh Hasan sebagai *Hoofdpanghulu* Bandung sedang tidak diisi oleh siapapun dan Hasan dipindahkan ke sana.

Perubahan Politik dan Sosial di Aceh Pada Masa Transisi

Fase transisi di Aceh sulit diterima oleh masyarakat pada umumnya. Beberapa dari mereka bahkan mengalami depresi yang berkepanjangan. Masyarakat diambang pada dua pilihan, memilih pihak pemerintah kolonial atau Kesultanan (Kloos, 2013). Menurut pandangan Hasan, di satu sisi mereka merasa terjepit oleh perilaku Sultan yang tidak memihak kepada rakyat. Di sisi yang lain, pemerintah kolonial mengancam kehidupan mereka. Selain itu, pertentangan antara Kesultanan dan pemerintah kolonial semakin gencar terjadi. Sultan tidak dapat secara gamblang menentukan sikapnya.

Hasan mengandaikan fenomena ini melalui sebuah perumpamaan seorang pasien yang sakit yang harus berobat kepada seorang dokter. Pasien sakit adalah masyarakat dan dokter adalah Sultan serta untuk mengobati pasiennya, pemerintah kolonial mencoba mengamati para ulama untuk menentukan solusi apa yang dapat diambil oleh pemerintah kolonial. Manakala pemerintah kolonial ingin mengerti keadaan ulama di Aceh, Sultan mengacuhkannya.

“Maka dari perkara disebout sangka bodoh sama compeni itoe tidak sekali2 sebab saja taoe jang compeni lagi mengadjar sama orang jang soedah liwat oeroes dan lagi mengobatti penjakit dengan tjobaan belom sampei kenali mana obat jang menjoemboekan maka dari itoe tentoe orang bodong sangka jang Doctoor itoe

bodoh sebetoelnja kadang2 ada obat jang belum sampei atoeran lamanja soedah diganti lagi. Tadi menjahoet jang compeni itoe lagi mengobatti penjakit Atjeh tetapi memangnja obat demam dilepas sadja dibagi kekampoeng tentoe jang berobat ada koerangnja atawa lebih dari atoeran. Maka itoe penjakit tidak habis teroes tesohor obat Doctoer tidak baek” (Mustapa, 1894)

Akibat dari kejadian tersebut muncul sikap dari sebagian besar masyarakat Aceh yaitu depresi sosial. Pada fase depresi sosial ini sebagian besar masyarakat Aceh mengalami permasalahan dan gangguan atas dirinya sendiri yang dalam catatan Hasan disebut sebagai “*penjakit*”. Hal ini tentunya memunculkan perubahan perilaku yang signifikan dari masyarakat Aceh. Mulai dari menghisap ganja secara berlebihan serta pembunuhan yang terjadi di mana-mana setiap harinya.

Penyelidikan harus terus dilakukan karena banyak berita dan rumor yang beredar tanpa dasar. Pejabat lokal dan polisi diminta untuk mengumpulkan lebih banyak informasi dan mata-mata dikirim ke daerah tersebut. Proses penyelidikan seperti ini sebenarnya menjadi ciri umum tanggapan Belanda terhadap kekerasan di koloni. Tidak konsistennya ini kemudian ditekankan oleh wacana kolonial Belanda yang mengubah gosip dan rumor menjadi “*fakta*” tentang kolonial dan masyarakat pribumi (Stoler, 2009). Kekerasan yang dihadapi berupa memarjinalkan orang-orang cenderung dilakukan dalam kasus *Atjeh-moorden*. Banyak pelaku mengalami gangguan akibat kehadiran kolonial. Kesimpulannya, respon terhadap kekerasan ini sangat dipengaruhi oleh logika kolonial dan reproduksi pengetahuan kolonial. Di sisi lain, perburuan yang mengarah kepada pembunuhan tersebut sangat mungkin diakibatkan oleh resolusi Perang Sabil (Reid, 2010).

Namun, di sisi lain kehadiran Sultan Aceh tidak dapat dianggap sebagai suatu hal yang sepele. Layaknya bunga, nama Sultan Muhammad Daud Syah begitu harum di Kesultanan Aceh. Tidak seperti apa yang Hasan lihat, penduduk Aceh tetap memberikan penghormatannya pada Sultan. Hal ini membuktikan bahwa Hasan memiliki sikap tendensius pada Kesultanan Aceh saat itu. Ia menganggap otoritas Sultan hanya sebagai simbol belaka. Sultan terkenal karena tiada henti melakukan daya upaya dalam mempertahankan kemegahan Kesultanan Aceh dari ancaman Kolonial Hindia Belanda. Pengakuan Hasan pun demikian adanya seperti yang ditulis dalam buku catatan hariannya. *Saja menjaoet saadenja dengan sandinja padahal Muhamad Daut satoe radja boediman melihara dia poenja gelarnja sendiri ... (Mustapa, 1894).*

Namun, dalam premis utama yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ada beberapa pihak Uleebalang yang berpihak kepada kolonial ada pula yang masih setia dengan Sultan Aceh.

Mengingat runyamnya politik di Aceh, Hasan mencoba memetakan berbagai aristokrat yang memiliki jabatan tinggi. Bahkan dalam satu momen Hasan melihat penerus Sultan Aceh jikalau sultan tidak dapat memerintah lagi.

“Jang nama soedara tida ada lain dari satoe perempoean dan nama paman dari sapoepoe ada anam tetapi ada jang paling dekat dari Kesoeltanan tetapi bodo dan ada jang pintar memikir negeri tetapi ada djaoe dari hak Kasoeltanan ijaitoe jang nama Toewankoe Hasim Banta Moeda Mangkoeradja saorang boediman bidjaksana” (Mustapa, 1894).

Dari kutipan tersebut kembali terdapat pujian yang ditujukan kepada Tuanku Hasyim Banta Muda yang disebut bijaksana. Tuanku Hasyim Banta Muda merupakan seorang terkemuka di Kesultanan Aceh yang ditunjuk sebagai wali Sultan ketika Perang Aceh terjadi karena ketika itu Muhammad Daud Syah masih kanak-kanak. Tuanku Hasyim berhasil mempersatukan para Teuku dan Teungku yang ada di Aceh dengan menyerukan Perang Sabil. Kesumat permusuhan tersebut termanifestasikan lagi dalam surat pernyataan Tuanku Hasyim Bangtamuda bersama para pemimpin Sagi di Aceh Besar, ditulis pada 18 April 1874, ditujukan kepada Teuku Imum Chik Lotan, Raja Geudong, Pasai. Inti terpenting dari pernyataan itu ialah tekad dan semangat untuk melawan dan bertahan (Abdullah, 2000).

Pendirian Hasan mengenai Perang Sabil yang diserukan secara terus-menerus akan selamanya terjadi sehingga perdamaian di sana sulit terlaksana karena pemerintah Hindia Belanda tidak pernah berniat untuk melakukan berdialog secara resmi maupun damai dengan Sultan. Perang Sabil yang sudah diserukan oleh Tuanku Hasyim pada agresi KNIL pertama dan kedua ke Aceh membuktikan kepiawaiannya sebagai politikus Kesultanan Aceh (Missbach, 2010). Hasan juga sempat menulis “... *Maka djikalau tidak diterima ini kita poenja atoeran maka boleh djadi ini negeri dipegang sama Perantjis atawa Sitamboel, sebab itoe Toeankoe Hasim satoe orang boediman dan Bidjaksana bisa mentjari djalan soepaja compeni belanda djengkel hatinja hingga poelang lagi dari Atjeh ...” (Mustapa, 1894).* Dari kutipan tersebut konteks yang dibangun adalah mengenai bagaimana Perang Sabil sebenarnya sangat berperan besar bagi dinamika perpolitikan di Kesultanan Aceh.

Hal yang perlu disoroti adalah berapa banyak dan siapa saja yang akhirnya memilih untuk ikut

dengan Hindia Belanda. Menurut catatan Hasan Mustapa beberapa orang berikut ikut menjadi pihak Hindia Belanda.

“Tentoe bilang bohong sebab bikin tjonto atoeran compeni kalau ada seorang baik sama moesoeh teroes tidak koembali lagi adapoen bangsa Atjeh tjoba lihat tjontonja Muhamad Daut lari ditinggal paman2nja makan gadji dari compeni T. Djohan sedara banta di koemala T. Nja Banta, panglima doewa poeloeh enam djaga negeri T. Amin djadi moeslimin T. Oemar soedara angkatnya djadi pehalawan compeni, T. Hasyim lari sama dia poenja bini tetapi soedaranja dan ipar2nja makan gadji compeni. T. Imam Lembata lari T. Hasyim Lembata ... toenggoe negeri kepertjaan compeni, T. Imam Atei lari soedaranja toenggoe negeri makan gadji compeni. Maka dari ini tjonto berapa djaoehnja dari atoeran compeni dan apakah ada katjo antara kedoewa pihaknja” (Mustapa, 1894).

Kutipan tersebut memperlihatkan beberapa nama terkenal yang membelot Sultan dan memihak Hindia Belanda. Namun, di sisi lain hal ini juga menjadi catatan besar bagi Hindia Belanda mengenai perlakuan hingga jalan politik yang harus mereka putuskan bagi Kesultanan Aceh. Alasan kuat Hindia Belanda untuk menerima mereka sebagian besar karena pragmatisme dari penambahan jumlah sekutu, tetapi alasan untuk bersiaga adalah karena sebenarnya para Teungku dan Teuku sedang bermain politik dua kaki (Supratman, 2020).

Setidaknya hal tersebut juga membuat Pemerintah Kolonial Hindia Belanda diharuskan waspada. Hal tersebut juga dilaporkan oleh Hasan kepada Snouck dalam berbagai suratnya. Salah satu surat yang paling banyak adalah mengenai permainan serta sikap dari Teuku Umar. Hasan Mustapa menilai sikap Teuku Umar ambivalen karena ‘ribuan suara pelurunya tetapi tidak mengenai Muslim sebagai sasarannya’ (*bidalīlā swāt banādiqih ulūfan walā yuhībā had min al-muslimīn*) (Rohmana, 2021b). Hasan juga memberikan kemungkinan bahwa sebenarnya Teuku Umar sudah terlebih dahulu meminta persetujuan Sultan Aceh sebelum mengikuti Hindia Belanda. Namun, jawaban dari Sultan tidak pernah ada yang berarti persetujuan Sultan mengenai rencana Teuku Umar tersebut juga begitu tidak jelas. Oleh sebab itu, Hasan memang melihat masyarakat Aceh dengan struktur yang kompleks.

SIMPULAN

Catatan harian seringkali melibatkan pertemuan dengan kebiasaan yang terjadi, juga mengarah pada eksplorasi keunikan pribadi. Tulisan-tulisan ini

cenderung berfokus pada penggambaran kebiasaan orang-orang yang direkam, sehingga pembaca dari latar belakang budaya yang sama dengan penulisnya dapat melihat perbedaan-perbedaan ini sebagai sesuatu yang kontroversi. Selain itu, latar belakang sosial-politik dan profesi penulis juga membentuk perspektif dan kepedulian mereka. Sebagai contoh, seorang penghulu atau ulama dapat menginterpretasikan realitas di luar diri mereka melalui ilmu kedokteran, mendiagnosa kondisi sosial dengan menggunakan terminologi lokal. Pendekatan ini memposisikan mereka sebagai penasihat bagi para pengambil keputusan politik. Dalam catatan perjalanan Hasan Mustapa dari akhir abad ke-19, terlihat jelas bahwa Hasan menggunakan terminologi politik lokal untuk menyampaikan pengalaman mereka. Hal ini menyoroti keragaman budaya dan bahasa yang dapat ditemukan dalam narasi pribadi. Sikap Hasan Mustapa yang ambivalen ketika menjabat sebagai Kepala Penghulu di Kutaraja ditunjukkan dari tulisan dalam catatan hariannya. Sebagai seorang cendekiawan Islam Hasan berusaha melihat fenomena di sekitarnya melalui sudut pandang agama. Namun, perspektif Hasan dipengaruhi oleh visi kolonial. Bagaimanapun pengabdianannya pada Snouck membuat ia berada dalam dua kutub yang bertentangan. Oleh karena itu, Hasan berusaha berada di kedua belah pihak. Inilah yang dimaksud dengan sikap ambivalen, berada dalam dua tindakan yang saling bertentangan. Sikap ini lazim ditemui di dalam diri para cendekiawan di abad XIX-XX. Hal ini dikarenakan pengaruh otoritas pemerintah kolonial yang mendominasi saat itu. Hasan melakukan berbagai kritik terhadap jalan yang ditempuh oleh Kesultanan Aceh dan Kolonial Hindia Belanda dalam melakukan ekspansinya di Aceh. Namun, di sisi lain Hasan juga sering melakukan kontak dengan Snouck sebagai saran maupun masukan dalam melaksanakan politik di Aceh. Sikap yang ambivalen ini menunjukkan bahwa Hasan Mustapa adalah seorang birokrat sejati yang bekerja secara profesional. Namun, di sisi lain ia juga tidak dapat mengabaikan kesalahan yang dilakukan oleh Kolonial Hindia Belanda di Kesultanan Aceh. Selain itu, Hasan juga menyoroti sikap dan perilaku orang Aceh di tengah memahami kebingungan situasi yang terjadi. Masyarakat Aceh harus memilih untuk berpihak pada Kesultanan atau Pemerintah Kolonial. Apalagi dengan apa yang terjadi dengan Sultan Muhammad Daud Syah diasingkan ke Ambon. Dualisme yang memunculkan konflik horizontal dan vertikal semakin terjadi dengan masif. Secara tidak langsung rakyat Aceh yang dilanda depresi yang mengakibatkan perilaku yang menyimpang. Hasan menuliskan fenomena yang terjadi sebagai penyakit Aceh. Pada titik ini, Aceh mengalami

sebuah fase tidak menentu. Akibatnya banyak pihak yang membelot secara cepat. Menurut Hasan, Teuku Umar adalah contoh fenomena yang menarik untuk diulas di mana pembelotan tersebut terjadi. Beragam peristiwa yang Hasan catat memberikan kontribusi bagaimana dinamika yang terjadi dalam fase transisi dan pengintegrasian xAceh ke dalam wilayah Hindia Belanda.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, I. (1987). *Perang di Jalan Allah: Perang Aceh 1873-1912*. Jakarta.
- Ankersmit, F. R. (1987). *Refleksi Tentang Sejarah: Pendapat-Pendapat Modern Tentang Filsafat Sejarah*. PT Gramedia.
- Asura, E. R. (2020). *Haji Hasan Mustafa: Sufi Besar Tanah Pasundan*. Mizan Media Utama.
- Azra, A. (2010). Krisis legitimasi Aceh. In A. S. Usman, *Krisis legitimasi politik dalam sejarah pemerintahan di Aceh*. Balitbang Diklat Puslitbang Lektur Keagamaan.
- Benda, H. J. (1958). Christiaan Snouck Hurgronje and the Foundations of Dutch Islamic Policy in Indonesia. *The Journal of Modern History*, 30(4), 338–347. <http://www.jstor.org/stable/1876034>
- Bhabha, H. K. (1994). *The Location of Culture*. Routledge.
- Burhanudin, J. (2017). *Islam dalam Arus Sejarah Indonesia*. Kencana.
- Buskens, L., Witkam, J. J., & Van Sandwijk, A. (2022). *Scholarship in Action: Essays on the Life and Work of Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936)*. Brill. <https://doi.org/10.1163/9789004513617>
- Chambert-Loir, H. (2013). *Naik Haji di Masa Silam: Kisah-Kisah Orang Indonesia Naik Haji* (Vol. 2). KPG.
- Damhoeri, A. (1939). *Hoeloebalang Teukoe Oemar*. Pustaka Islam.
- Djajadiningrat, A. (1927). Een Stuk van den Arbeid van Prof. Snouck Hurgronje in het Belang van de Intellectuele Ontwikkeling van het Indonesische Volk. *Djawa: Tijdschrift van Het Java Instituut*, 7, 65–67.
- Doel, W. van den. (2023). *SNOUCK: Biografi Ilmuwan Christiaan Snouck Hurgronje*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia & KITLV-Jakarta.
- Drewes, G. W. J. (1968). New Light on the Coming of Islam to Indonesia? *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 124(4), 433–459. <https://doi.org/10.1163/22134379-90002862>
- Drewes, G. W. J. (2008). Snouck Hurgronje, Christiaan (1857–1936). In A. J. C. M. Gabriels, *Biografisch Woordenboek van Nederland*. ING, Institute for Dutch History.
- Gobee, E., & Adriaanse, C. (1990). *Nasehat-Nasehat C Snouck Hurgronje Semasa Kepergawaiannya Kepada Pemerintahan Hindia Belanda 1889-1936*. Indonesian Netherlands Cooperation in Islamic Studies.
- Inlandsch Bestuur. (1882, September 22). *De Locomotief*. <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010290564:mpeg21:a0024>
- Kaptein, N. J. (2014). *Islam, Colonialism and the Modern Age in the Netherlands East Indies*. Brill.
- Kartini, T., Djulaeha, N., Saini, & Wibisana, W. (1985). *Biografi dan Karya Pujangga Haji Hasan Mustafa*. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kloos, D. (2013). *Becoming better Muslims Religious authority and ethical improvement in Aceh, Indonesia* [PhD-Thesis]. Vrije Universiteit Amsterdam.
- Kloos, D. (2014). A Crazy State: Violence, Psychiatry, and Colonialism in Aceh, Indonesia, ca. 1910–1942. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 170(1), 25–65. <https://doi.org/10.1163/22134379-17001003>
- Kuitenbrouwer, M. (2013). *Dutch Scholarship in the Age of Empire and Beyond*. Brill.
- Kuntowijoyo. (1994). *Metodologi Sejarah*. Tiara Wacana.
- Laatste Berichten. (1893, January 16). *Bataviaasch Nieuwsblad*, 3. <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:110618870:mpeg21:a0009>
- Laffan, M. F. (1999). Raden Aboe Bakar; An introductory note concerning Snouck Hurgronje's informant in Jeddah (1884–1912). *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 155(4), 517–542. <https://doi.org/10.1163/22134379-90003860>
- Laffan, M. F. (2002). “A Watchful Eye” ; The Meccan Plot of 1881 and Changing Dutch Perceptions of Islam in Indonesia. *Archipel*, 63(1), 79–108. <https://doi.org/10.3406/arch.2002.3698>

- Laffan, M. F. (2003). *Islamic Nationhood and Colonial Indonesia* (0 ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203222577>
- Laffan, M. F. (2015). *Sejarah Islam di Nusantara*. Mizan.
- Laffan, M. F. (2022). From Wayfarer to Wedono. Snouck Hurgronje and the Sufi Threat on Java, 1884-1892. In L. Buskens, J. J. Witkam, & A. Van Sandwijk, *Scholarship in Action: Essays on the Life and Work of Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936)*. Brill. <https://doi.org/10.1163/9789004513617>
- Lubis, N. H. (2020). *Metode Sejarah*. Satya Historika.
- McFate, M. (2019). Useful Knowledge: Snouck Hurgronje and Islamic Insurgency in Aceh. *Orbis*, 63(3), 416–439. <https://doi.org/10.1016/j.orbis.2019.05.005>
- Missbach, A. (2010). The Aceh War (1873–1913) and the Influence of Christiaan Snouck Hurgronje. In A. Graf, S. Schoter, & E. Wieringa, *Aceh: History, Politics and Culture* (pp. 39–62). ISEAS Publishing.
- Mustapa, H. (1894). *Catatan Harian* (Leiden University Library).
- Ozay, M. (2020). A Hadhrami Scholar and Islamic Court in Aceh: The Political Biography of ‘Abd al-Rahmān al-Zāhir (1864-1878). *Studia Islamika*, 27(1), 73–102. <https://doi.org/10.36712/sdi.v27i1.11072>
- Razy, M. R. O. A., Sofianto, K., & Jaelani, G. A. (2023). Discourse Of Islamization In Indonesia: Hoesein Djajadiningrat’s Vision In The Colonial And Postcolonial Periods. *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 12(1), 108–122.
- Reid, A. (2005). *Asal mula konflik Aceh: Dari perebutan pantai timur Sumatera hingga akhir Kerajaan Aceh abad ke-19*. Obor.
- Reid, A. (2010). War, Peace and the Burden of History in Aceh. *Asian Ethnicity*, 5(3), 301–314.
- Rohmana, J. A. (2012). Sundanese Sufi Literature and Local Islamic Identity: A Contribution of Haji Hasan Mustapa’s Dangding. *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies*, 50(2), 303–327. <https://doi.org/10.14421/ajis.2012.502.303-327>
- Rohmana, J. A. (2016). Persahabatan Penjajah dan Bangsa Jajahan di Hindia Belanda: C. Snouck Hurgronje dan Haji Hasan Mustapa. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 12(2), 144–168. <https://doi.org/10.18196/aijjs.2016.0060.144-168>
- Rohmana, J. A. (2018a). *Informan Sunda Masa Kolonial: Surat-Surat Hadji Hasan Moestapa untuk C. Snouck Hurgronje dalam kurun 1894-1923*. Octopus.
- Rohmana, J. A. (2018b). Rereading Christiaan Snouck Hurgronje: His Islam, Marriage and Indo-European Descents in the Early Twentieth-Century Priangan. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 26(1), 35. <https://doi.org/10.21580/ws.26.1.2148>
- Rohmana, J. A. (2021a). Colonial informants and the Acehese-Dutch war Haji Hasan Mustapa’s response to Teuku Umar’s collaboration with the Dutch authorities in the East Indies. *Indonesia and the Malay World*, 49(143), 63–81.
- Rohmana, J. A. (2021b). Menjaga Sastra Sunda, Menempuh Jalan Spiritualitas Berbeda: Kontribusi Ajip Rosidi terhadap Warisan Karya-karya Haji Hasan Mustapa. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*, 5(3), 361–374. <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v5i3.13302>
- Rosidi, A. (1989). *Haji Hasan Mustafa Jeung Karya-Karyana* (1st ed.). Penerbit Pustaka.
- Sastrahadiprawira, R. M. (1931). Hadji Hasan Moestopa’s Adatgebruiken Der Soendaneezen. *Djawa*, 11, 19–30.
- Sjamsuddin, H. (2012). *Metodologi Sejarah*. Ombak.
- Steenbrink, K. (1995). *Kawan dalam pertikaian: Kaum kolonial Belanda dan Islam di Indonesia 1596–1942* (S. A. Jamrah, Trans.). Mizan.
- Stoler, A. L. (2009). *Along the Archival Grain: Epistemic Anxieties and Colonial Common Sense*. Princeton University Press.
- Suminto, H. A. (1985). *Politik Islam Hindia Belanda*. LP3ES.
- Supratman, F. R. (2020). Surat Kabar Basiret: Melihat Perang Aceh (1873-1904) dari Istanbul dan Kairo. *Lembaran Sejarah*, 15(1), 91. <https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.59526>
- van Koningsveld, P. S. J. (1989). *Snouck Hurgronje dan Islam: Delapan Karangan tentang Hidup dan Karya Seorang Orientalis Zaman Kolonial*. Grimukti Pasaka.
- Veer, P. V. (1985). *Perang Aceh: Kisah Kegagalan Snouck Hurgronje*. PT Grafiti Press.
- Witkam, J. J. (2022). *Scholarship in Action: Essays on the Life and Work of Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936)* (L. Buskens, Ed.). Brill. <https://doi.org/10.1163/9789004513617>